

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kinerja Pemerintah

2.1.1. Pengertian Kinerja Pemerintah

Menurut Mahsun (2006), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja pemerintah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja pemerintah, maka seluruh aktivitas sumber daya baik secara finansial maupun non-finansial harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak hanya bergantung pada *input* dari kegiatan tersebut tetapi pengukuran tersebut lebih menekankan pada *output* dan *outcome* yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan.

Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas (Sihaloho & Halim, 2005).

2.1.2. Pengukuran Kinerja Pemerintah

Menurut Mahsun (2006), pengukuran kinerja meliputi aspek-aspek:

1. Kelompok masukan (*input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok proses (*process*)

Ukuran kegiatan, baik dari segi keceptan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.

3. Kelompok keluaran (*output*)

Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat atau tidak dapat terwujud.

4. Kelompok hasil (*outcome*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

5. Kelompok manfaat (*benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

6. Kelompok dampak (*impact*)

Pengaruh negatif atau positif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan.

Kinerja pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Damayanti (2017) dan Krisherdian (2015) yang telah dimodifikasi.

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai berikut:

"kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.2. Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2001), terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif kegiatan yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang nominal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Damayanti (2017) yang telah dimodifikasi.

2.3. Transparansi

2.3.1. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Keterbukaan informasi dalam kegiatan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip tata kelola yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu penopang akuntabilitas (Mahsun, 2006).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ningrum, 2010). Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang

sangat penting baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Werimon, dkk. (2007), prinsip transparansi meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Menurut Sopanah (2003), anggaran yang disusun oleh pemerintah dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Keterbukaan informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi.

2.3.3. Pengukuran Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informasi antara lain:

- a. Tepat waktu
 - b. Memadai
 - c. Jelas
 - d. Akurat
 - e. Dapat diperbandingkan
 - f. Mudah diakses
- ### 2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial

- a. Kondisi keuangan
- b. Susunan pengurus
- c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Pengukuran transparansi dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Krisherdian (2015) yang dimodifikasi.

2.4. Pengendalian Internal

2.4.1. Pengertian Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

"proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Menurut Bastian (2006), tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong diaptuhinya kebijakan manajemen.

2.4.2. Komponen Pengendalian Internal

Ada lima komponen pengendalian internal COSO yang saling berhubungan:

1. Lingkungan pengendalian
 - a. Nilai integritas dan etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Filosofi manajemen dan gaya operasi
 - d. Struktur organisasi
 - e. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya
 - f. Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur
2. Aktivitas pengendalian
 - a. Pemisahan tugas

- b. Dokumen dan catatan yang memadai
 - c. Akses terbatas ke harta karyawan organisasi
 - d. Pengecekan akuntabilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen
 - e. Pengendalian pengolahan informasi
 - f. Informasi dan komunikasi
3. Penilaian risiko
 4. Informasi dan komunikasi
 5. Pengawasan

Komponen pengendalian internal dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Damayanti (2017) yang telah dimodifikasi.

2.5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* dalam entitas. Hubungan antara agen dan prinsipal tidak selalu berjalan dengan baik dan bisa terjadi konflik. Konflik yang terjadi ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, agen cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal (Gudono, 2009). Teori keagenan dibangun untuk memecahkan masalah yang timbul karena tidak lengkapnya informasi yang diperoleh.

Dalam mengatasi konflik yang timbul, prinsipal harus memonitori kinerja agen agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2002). Akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya

agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan setiap aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dalam penelitian ini hubungan antara masyarakat dengan pemerintah merupakan hubungan antara prinsipal dengan agen. Pemerintah yang bertanggung jawab bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan maka dibutuhkan pengendalian internal yang sangat memadai atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar tercipta pemerintahan yang bersih.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Mahsun (2006), mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai berikut:

"kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintah pertanggungjawaban tersebut."

Akuntabilitas melibatkan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengukur pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dikerjakan. Dalam menciptakan akuntabilitas diperlukan adanya partisipasi pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program dan kegiatan. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintah dalam membagikan informasi yang

diperlukan oleh penggunanya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan akan membuktikan anggaran telah diarahkan pada pencapaian masyarakat. Akuntabilitas akan mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi lebih maksimal dalam menjalankan program dan dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan akuntabilitas. Pemerintah yang akuntabel memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya akuntabilitas diharapkan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga akan terwujud kinerja instansi yang baik.

2.6.2. Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau sudah diambil oleh pemerintah yang tercantum dalam anggaran daerah. Melalui transparansi masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah.

Adanya penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraannya pemerintah mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.

2.6.3. Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 , mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

"proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian kinerja organisasi tersebut. Pelaksanaan pengendalian internal dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi baik sebagai individu maupun kelompok.

2.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dengan judul "Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang)" menunjukkan hasil penelitian bahwa pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Krisherdian (2015) dengan judul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember" menunjukkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jitmau dkk. (2017) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong" menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sorong, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sorong.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jatmiko (2020) dengan judul "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman". Penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, akuntabilitas

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah; dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Damayanti & Hermanto (2018) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah". Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah SKPD Kota Surabaya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|----------------------|---|-----------------------------|--|
| Damayanti (2017) | Variabel Independen : X1 : Pengendalian Internal X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Akuntabilitas Publik Variabel Dependen: Y : Kinerja Instansi Pemerintah | SKPD Kabupaten Deli Serdang | 1. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 3. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. |
| Krisherdian (2015) | Variabel Independen: X1 : Transparansi X2 : Akuntabilitas Keuangan Daerah Variabel Dependen: Y : Kinerja Pemerintah | Pemerintah Kabupaten Jember | 1. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. |
| Jitmau, dkk., (2017) | Variabel Independen: X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi | Pemerintah Kabupaten Sorong | 1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | X3 : Fungsi Pemeriksaan Intern Variabel Dependen: Y : Kinerja Pemerintah | | 2. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. 3. Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. |
| Jatmiko (2020) | Variabel Independen: X1 : Pengawasan Intern X2 : Akuntabilitas X3 : Transparansi Variabel Dependen: Y : Kinerja Pemerintah | Pemerintah Kabupaten Sleman | 1. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. |
| Damayanti & Hermanto (2018) | Variabel Independen: X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi X3 : Pengendalian Internal Variabel Dependen: Y : Kinerja Pemerintah | Pemerintah Kota Surabaya | 1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. |

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Mahsun (2006), mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai berikut:

"kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintah pertanggungjawaban tersebut."

Akuntabilitas melibatkan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengukur pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh kegiatan yang dikerjakan. Dalam menciptakan akuntabilitas diperlukan adanya partisipasi pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program dan kegiatan. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintah dalam membagikan informasi yang diperlukan oleh penggunanya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan akan membuktikan anggaran telah diarahkan pada pencapaian masyarakat. Akuntabilitas akan mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi lebih maksimal dalam menjalankan program dan dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian Jatmiko (2020), akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

2.8.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi. Adanya penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah dapat

meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraannya pemerintah mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Berdasarkan penelitian Krisherdian (2015), transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

2.8.3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, mendefinisikan pengendalian internal sebagai:

"proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pemerintah dapat memberikan keyakinan dan hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian kinerja organisasi tersebut. Pelaksanaan pengendalian internal dapat efektif apabila ada komitmen diantara

pihak-pihak yang terkait dalam organisasi baik sebagai individu maupun kelompok. Berdasarkan penelitian Damayanti & Hermanto (2018) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

